

LAPORAN KINERJA PEGAWAI

TRIWULAN I TAHUN 2019

NAMA : **RAKHMAD RIZALI, S.Kep**
NIP : **19830318 200501 1 003**
PANGKAT / GOL : **PENATA (III/c)**
JABATAN : **Kepala Seksi Pelayanan Kontrasepsi pada
Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga
Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan
Perlindungan Anak**

DAFTAR ISI

	Halaman
Cover	1
Daftar Isi	2
Daftar tabel dan Gambar.....	3
BAB I Pendahuluan.....	4
A. Uraian Tugas Pokok dan Fungsi.....	4
B. Struktur Jabatan.....	5
BAB II Akuntabilitas Kinerja Jabatan	6
A. Perjanjian Kinerja.....	6
B. Capaian Kinerja.....	6
C. Evaluasi dan Analisis Kinerja.....	7
D. Rencana Tindak Lanjut.....	11
D. Tanggapan Atasan Langsung.....	11
BAB III Penutup	12

DAFTAR TABEL dan GAMBAR

Tabel	halaman
Tabel 2.1. Perjanjian Kinerja	6
Tabel 2.2. Capaian Kinerja.....	6
Tabel 2.3. Metode penyimpulan capaian kinerja.....	7
Tabel 2.4. Target Kinerja berdasar topuksi.....	10
Gambar	
Gambar 1.1 Struktur Jabatan	5

BAB I

PENDAHULUAN

A. Uraian Tugas Pokok dan Fungsi

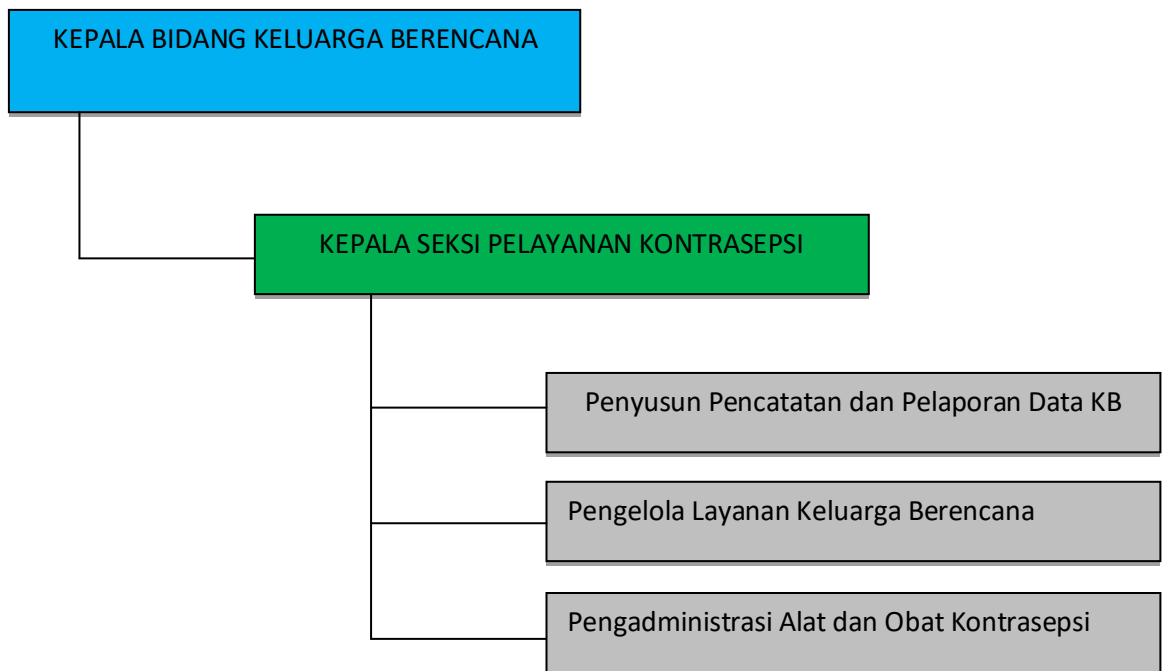
Berdasarkan Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 82 Tahun 2016 tentang kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Kabupaten Hulu Sungai Selatan, pasal 17 menyatakan tugas Seksi Pelayanan Kontrasepsi adalah sebagai berikut :

- a. menyusun rencana kegiatan Seksi Pelayanan Kontrasepsi;
- b. menghimpun, mengolah dan menganalisa data dan bahan mengenai pelaksanaan pelayanan Kontrasepsi;
- c. menyiapkan bahan penyusunan petunjuk teknis, Standar Operasional Prosedur (SOP) dan pembinaan mengenai strategi pelaksanaan pengendalian dan pembinaan akseptor Keluarga Berencana dan pelayanan kontrasepsi;
- d. melaksanakan kegiatan penyusunan rencana program operasional, pengendalian, pembinaan serta strategi pelaksanaan pengendalian dan pembinaan akseptor Keluarga Berencana dan pelayanan kontrasepsi;
- e. melaksanakan kegiatan Pelayanan Kontrasepsi, melalui Tim Keliling Keluarga Berencana, Tim Mobil Unit Pelayanan Keluarga Berencana maupun pada kegiatan momentum terhadap Pasangan Usia Subur;
- f. melaksanakan pengelolaan, penyimpanan, penyaluran/distribusi alat kontrasepsi pada gudang alokon Keluarga Berencana Kabupaten;
- g. melaksanakan evaluasi dan analisis pelaksanaan kegiatan, pelayanan kontrasepsi, dan pengelolaan alat dan obat kontrasepsi Keluarga Berencana;

- h. menyiapkan bahan kerjasama dengan instansi, lembaga swadaya masyarakat, kader dalam pelaksanaan pelayanan kontrasepsi; dan
- i. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala Bidang Keluarga Berencana sesuai bidang tugas.

B. Struktur Jabatan

Seksi Pelayanan Kontrasepsi berada pada Bidang Keluarga Berencana dan idealnya memiliki 3 Pelaksana berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2017 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2016 tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Instansi Pemerintah, namun karena keterbatasan jumlah sumber daya manusia yang ada maka hanya ada satu orang Pelaksana. Meskipun demikian diharapkan tidak mengganggu pencapaian target, sehingga *outcome* yang diharapkan bisa optimal. Struktur jabatan bisa dilihat pada gambar 1.1 berikut :



Gambar 1.1 Struktur Jabatan

BAB II
AKUNTABILITAS KINERJA JABATAN

A. Perjanjian Kinerja

Tabel 2.1 Perjanjian Kinerja

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Target Bulan Ke-			Program	Kegiatan	Anggaran
				1	2	3			
1	2	3	4	5			6	7	8
1	Terlaksananya pelayanan KBKR yang merata dan berkualitas	Jumlah PUS yang ber KB menggunakan alat kontrasepsi	Peserta KB Aktif		34312		Program Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi Remaja (KRR)	Penyediaan Pelayanan Keluarga Berencana	Rp 259.507.900

B. Capaian Kinerja

Tabel 2.2 Capaian Kinerja

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Target Bulan Ke-			Realisasi Bulan Ke-			Capaian Kinerja	Program	Kegiatan	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	Serapan Anggaran (%)
				1	2	3	1	2	3						
1	2	3	4	5			6			7	8	9	10	11	12
1	Terlaksananya pelayanan KB KR yang merata dan berkualitas	Jumlah PUS yang ber KB menggunakan alat kontrasepsi	Peserta KB Aktif		34312			37158		108,29%	Program Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi Remaja (KRR)	Penyediaan Pelayanan Keluarga Berencana	Rp 259.507.900	Rp 56.800.000	21,89%

Keterangan : Data Capaian Kinerja berdasarkan laporan Statistik Rutin BKKBN pada <http://aplikasi.bkkbn.go.id/SR>

C. Evaluasi dan Analisis Kinerja

Metode penyimpulan capaian kinerja berdasar pada *output* dengan standar 100 dan diinterpretasikan dengan mencapai, tidak mencapai, dan atau melebihi target. Interpretasi tersebut bisa dilihat pada tabel 2.3 berikut:

Tabel 2.3 Metode penyimpulan capaian kinerja

No	Capaian	Interprestasi
1	>100%	Melebihi Target
2	= 100%	Mencapai Target
3	< 100%	Tidak Mencapai Target

Berdasarkan tabel capaian kinerja Triwulan I 2019 capaian kinerja Seksi Pelayanan Kontrasepsi Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Kabupaten Hulu Sungai Selatan dari Sasaran dan indikator sasaran mencapai 108,29%.

Capaian kegiatan lainnya yang dilaksanakan pada Triwulan I adalah sebagai berikut:

- 1) Kegiatan Pemenuhan Sarana dan Prasarana Pelayanan dan Penyuluhan KB (DAK Fisik)

Belum ada realisasi sesuai perencanaan, selanjutnya proses survei, pembuatan kontrak, reviu APIP sebagai salah satu syarat penyaluran tahap pertama sedang berjalan.

- 2) Kegiatan Operasional Balai Penyuluhan KB (DAK Non Fisik – BOKB)

Beberapa kegiatan terealisasi, namun karena kendala sumber daya dan beberapa kesalahan pelaporan serta pertanggungjawaban sehingga proses realisasi menjadi terhambat.

- 3) Kegiatan Operasional Penggerakan Program KKBPK di Kampung KB (DAK Non Fisik – BOKB)

Secara umum kegiatan yang dilaksanakan di Kampung KB masih didominasi oleh kegiatan KKBPK, sementara kegiatan dari instansi lintas sektor relatif terbatas; sarana yang ada di Kampung KB umumnya masih terbatas pada sarana KIE kegiatan KKBPK dan sarana KIE dari Kesehatan sementara sarana dari instansi lintas sektor lainnya tidak banyak ditemukan di Kampung KB; dan secara umum, pembinaan Kampung KB masih bersifat sektoral dan belum terjadwal dan belum terkoordinasi. Karena inilah kegiatan di Kampung KB tidak optimal dan pada akhirnya mempengaruhi realisasi.

4) Kegiatan Dukungan Media KIE dan Manajemen BOKB (DAK Non Fisik – BOKB)

Beberapa kegiatan terealisasi, namun beberapa kesalahan pelaporan serta pertanggungjawaban sehingga proses realisasi menjadi terhambat.

5) Kegiatan Operasional Pembinaan Program KB bagi Masyarakat oleh Kader PPKBD dan Sub PPKBD (DAK Non Fisik – BOKB)

Institusi Masyarakat Pedesaan/Perkotaan (IMP) adalah wadah masyarakat yang berperan serta dalam pengelolaan Program KKBPK baik dalam bentuk kelompok/organisasi maupun perorangan yang mempunyai pengaruh di masyarakat. IMP ditingkat desa/kelurahan yang dikenal dengan nama PPKBD (Pembantu Pembina Keluarga Berencana Desa/Kota), sedangkan IMP tingkat dusun/RW disebut Sub PPKBD.

kader IMP merupakan sumber daya manusia lokal yang sangat penting dan menjadi satu kekuatan yang dapat diandalkan untuk tetap dapat mempertahankan keberhasilan program KB di masyarakat seiring dengan terus menurunnya jumlah Penyuluh KB yang aktif karena pindah dan pensiun.

Sekarang ini, Kader IMP secara faktual telah lahir dan hadir namun belum nampak kompetensi yang dimiliki serta belum

terlibat dan berperan serta secara aktif sebagaimana semestinya. Sehingga kekurangan dan kelemahan baik dalam pelaksanaan maupun pelaporan di lapangan menjadi kendala pada kegiatan ini.

6) Kegiatan Operasional Distribusi Alat dan Obat Kontrasepsi ke Faskes (DAK Non Fisik – BOKB)

Beberapa kegiatan terealisasi namun realisasi keuangan belum ada, selanjutnya kendala sumber daya manusia yang sangat terbatas juga menjadi suatu masalah sehingga proses realisasi menjadi terhambat.

Output enam kegiatan tersebut mempunyai tujuan spesifik untuk mencapai indikator perkegiatan. Namun secara umum *outcome* seluruh rangkaian kegiatan adalah untuk mempertahankan Jumlah PUS yang ber-KB menggunakan alat kontrasepsi (Peserta KB Aktif) dan menambah Jumlah PUS yang ber-KB (Peserta KB baru). Oleh karena itu ada saling keterkaitan antara kegiatan dengan perjanjian kinerja pada tabel 2.1.

Selanjutnya untuk menunjang Perjanjian Kinerja disusunlah target kinerja (bisa dilihat pada tabel 2.4) yang disesuaikan dengan tupoksi dan kegiatan tambahan lainnya. Dalam hal ini setiap item tupoksi dijabarkan dengan beberapa item kegiatan dengan target kinerja yang realistis. Setiap item target kinerja tersebut pada bertujuan spesifik pada setiap tupoksi. *Output* yang diharapkan adalah terealisasinya target kinerja yang direncanakan. *Outcome* dari seluruh rangkaian kegiatan juga untuk mempertahankan Jumlah PUS yang ber-KB menggunakan alat kontrasepsi (Peserta KB Aktif) dan menambah Jumlah PUS yang ber-KB (Peserta KB baru). Dengan demikian, perjanjian kinerja pada tabel 2.1 bisa direalisasikan melalui rangkaian kegiatan pada target kinerja berdasar tupoksi dan enam kegiatan yang sudah disebutkan terdahulu.

Tabel 2.4 Target Kinerja berdasar topuksi

NO	TOPUKSI		TARGET KINERJA	SATUAN	Jan	Feb	Mar
1	menyusun rencana kegiatan Seksi Pelayanan Kontrasepsi	1.1	Menyusun Pra RKA T.A 2020	Dokumen			3
		1.2	Menyusun RKA pergeseran T.A 2019	Dokumen		2	
2	menghimpun, mengolah dan menganalisa data dan bahan mengenai pelaksanaan pelayanan Kontrasepsi	2.1	Membuat Laporan pelaksanaan pelayanan kontrasepsi	Dokumen		1	1
3	menyiapkan bahan penyusunan petunjuk teknis, Standar Operasional Prosedur (SOP) dan pembinaan mengenai strategi pelaksanaan pengendalian dan pembinaan akseptor Keluarga Berencana dan pelayanan kontrasepsi	3.1	Membuat Petunjuk Pelaksanaan Bantuan Operasional Keluarga Berencana	Dokumen			1
		3.2	Membuat Petunjuk Teknis Pelayanan kontrasepsi	Dokumen		1	
		3.3	Membuat SOP Pelayanan Kontrasepsi	Dokumen		1	
4	melaksanakan kegiatan penyusunan rencana program operasional, pengendalian, pembinaan serta strategi pelaksanaan pengendalian dan pembinaan akseptor Keluarga Berencana dan pelayanan kontrasepsi	4.1	Melakukan Pembinaan Faskes Klinik KB	Kegiatan		1	1
		4.2	Membuat Laporan Hasil Pembinaan Faskes Klinik KB	Dokumen		1	1
5	melaksanakan kegiatan Pelayanan Kontrasepsi, melalui Tim Keliling Keluarga Berencana, Tim Mobil Unit Pelayanan Keluarga Berencana maupun pada kegiatan momentum terhadap Pasangan Usia Subur	5.1	Membuat perencanaan kebutuhan kegiatan pelayanan KB Gratis melalui MUYAN KB	Kegiatan			1
		5,2	Memfasilitasi kegiatan Pelayanan KB Gratis melalui MUYAN KB	Kegiatan			1
		5,3	Membuat Laporan Pelaksanaan Pelayanan KB Gratis melalui MUYAN KB	Dokumen			
6	melaksanakan pengelolaan, penyimpanan, penyaluran/distribusi alat kontrasepsi pada gudang alokon Keluarga Berencana Kabupaten	6.1	Membuat Pedoman pengendalian dan pendistribusian Alokon	Dokumen		1	
		6.2	Menganalisa Kebutuhan Alokon pada Faskes Klinik KB	Dokumen		1	1
		6.3	Mendistribusikan Alokon ke Faskes KB	Kegiatan		1	1
7	melaksanakan evaluasi dan analisis pelaksanaan kegiatan, pelayanan kontrasepsi, dan pengelolaan alat dan obat kontrasepsi Keluarga Berencana	7.1	Membuat Laporan Evaluasi hasil pelaksanaan kegiatan pelayanan kontrasepsi akhir tahun	Dokumen			
8	menyiapkan bahan kerjasama dengan instansi, lembaga swadaya masyarakat, kader dalam pelaksanaan pelayanan kontrasepsi	8.1	Melakukan Rapat monitoring dan evaluasi bulanan	kegiatan		1	1

D. Rencana Tindak lanjut

Langkah-langkah atau tindak lanjut untuk mengatasi kendala dan hambatan yang dihadapi dalam pencapaian Sasaran Kegiatan dan pencapaian Indikator Kinerja Sasaran diatas adalah sebagai berikut:

1. Optimalisasi beberapa kegiatan yang belum terealisasi sesuai target.
2. Perencanaan target perlu memperhatikan asas *challenging but achievable* dengan bahasa lain target tidak boleh terlalu tinggi sehingga tidak mungkin tercapai atau terlalu rendah sehingga dengan mudah bisa tercapai.
3. Angka capaian kinerja yang melebihi target harus didiskusikan secara kritis, kontekstual, dan ilmiah.

E. . Tanggapan Atasan Langsung

Laporan kurang baik

Laporan sudah baik

Laporan diperbaiki

Realisasi diteliti ulang

Capaian diteliti ulang

Lain-lain..... (ditulis tangan bila ada).

kinerja dapat selalu ditingkatkan

dan pertahankan yang sudah tercapai

Jumlah dan nama pilihan disposisi dapat diisi sesuai kebutuhan yang diperlukan dengan mencentang (✓).

BAB III

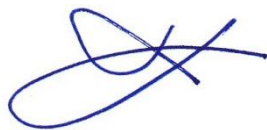
PENUTUP

Capaian kinerja Triwulan I 2019 capaian kinerja Seksi Pelayanan Kontrasepsi Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Kabupaten Hulu Sungai Selatan dari Sasaran dan indikator sasaran mencapai 108,29%. Angka capaian yang melebihi ini dicapai berkat kerja sama yang baik antara para pihak. Keterpaduan program dan kegiatan pada seksi ini juga menopang pencapaian tersebut. Meskipun ada beberapa kegiatan yang belum optimal namun tidak mengurangi *output* capaian. Akan tetapi hal itu akan menjadi dasar evaluasi dan perbaikan pada triwulan selanjutnya. Dengan demikian, sinkronisasi dan keterpaduan kegiatan dengan indikator sasaran menjadi sangat penting serta adanya keberlanjutan kegiatan yang juga tidak kalah penting.

Tanggal, 01 April 2019

Mengetahui,
Atasan Langsung

Kepala Bidang Keluarga Berencana,



SYAHRIL SOFIAN

Pembina

NIP.197107261997032005

Kepala Seksi Pelayanan
Kontrasepsi,



RAKHMAD RIZALI, S.Kep

Penata

NIP.19830318 200501 1 003